

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Abdul Gafur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII, Press, 2009, Hal.35-49.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal 503.

Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hal. 95.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 21.

Anke Dwi Saputro (penyalur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta, PT Gramedia, 2008, hal. 93-94.

Anke Dwi Saputro (penyadur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Masa Datang*. Jakarta, PT. Gramedia, 2008, hal. 98.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Cetakan kesatu, 2008, hal. 77.

Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63.

G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Jakarta, Erlangga, hal. 51-52.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal, 3.

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, (Selanjutnya disebut Buku IV), hal 6.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, dengan Judul Buku asli, General *Teori Of Law dan State*. Alih Bahasa oleh Somardi, Jakarta, Rimdi Press, 1996, hal. 65.
- J. J. J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Jakarta UI Pres, 1996, hal. 203.
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal. 270.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995, hal. 9.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 43.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal. 80.
- Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Andi, 2006, hal. 6.
- Masri Sangarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1989, hal. 34.
- Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal 52.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), edisi Januari 2000, hal. 43.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Suatu Penjelasan), Jakarta, PT. Grafindo, 1993, hal 1.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 36.
- Ranchman Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, Cetakan Keenam, 1999, Hal 3.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 21.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 29.

Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal. 48.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta, Rajawali Pres, hal. 7.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, hal. 307.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 70.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 6.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, ANDI, 2000, hal. 4.

Soegondo, R., Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Bandung, Alumni, 2004, hal. 31.

## **B. Peraturan/Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat.

Per Pres Nomor 47 Tahun 2009 Tentang pembentukan dan organisasi kementerian Negara.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik, dirumuskan oleh Tim Perumus Kode Etik yaitu : R Muhammad Hendarman, S.H., DR. Muhammad Affandhi Nawawi, S.H., DR. Perlien Budiono, S.H., Darmawi Sidi Bakaroeeddin, S.H., terdiri dari VII Bab dan 15 Pasal.

### **C. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Notaris Yusmarni, SH, Tanggal 20 Januari 2017.

Wawancara dengan Notaris Helsy Yasin, SH, Mkn, Tanggal, 23 Januari 2017.

Wawancara dengan Fico, Pegawai Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wilayah Sumatera Barat, pada Tanggal 21 Februari 2017.

Wawancara dengan Serly Kurnia Fitri, Pegawai Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wilayah Sumatera Barat, pada Tanggal 21 Februari 2017.

Wawancara dengan Sisca, Staf Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Padang pada Tanggal 20 Februari 2017.

Wawancara dengan Alexander,SH. Anggota MPW Sumatera Barat, pada Tanggal 21 Mei 2017.